



## GUBERNUR GORONTALO

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **FAYZAL LAMAKARAKA, S.STP**  
Jabatan : **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO**

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **Dr. Ir. HAMKA HENDRA NOER, M.Si**  
Jabatan : **PENJABAT GUBERNUR GORONTALO**

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gorontalo, 20 Januari 2023

PIHAK KEDUA,

**Dr. Ir. HAMKA HENDRA NOER, M.Si**

PIHAK PERTAMA,

**FAYZAL LAMAKARAKA, S.STP**


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI GORONTALO**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan yang lestari	▪ Indeks kualitas air (IKA)	51 Poin
		▪ Indeks Kualitas Udara (IKU)	90.93 Poin
		▪ Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	75.26 Poin
		▪ Indeks Kualitas Lahan (IKL)	79.72 Poin
		▪ Persentase Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan/ Persetujuan Lingkungan, Sertifikat Laik Operasi (SLO) dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	76 %
		▪ Luas Lahan Kritis yang Direhabilitasi	93 Ha
2	Meningkatnya Pengelolaan Hasil Hutan Kayu dan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Kompetitif dan Berkelanjutan	▪ Produksi HHK dan	13,977.027 m³
		▪ HHBK	3,041.273 ton
		▪ Persentase akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial	8 %
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang baik	▪ Nilai SAKIP	BB
		▪ Nilai Kepuasan Masyarakat	B

Program	Anggaran	Keterangan
1. Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup	Rp. 534.454.304	APBD (DAU)
2. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Rp. 58.382.600	APBD (DAU)
3. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Rp. 321.256.075	APBD (DAU)
4. Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 99.894.900	APBD (DAU)
5. Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Rp. 196.513.318	APBD (DAU)
6. Pengelolaan Hutan	Rp. 3.169.622.889	DAU - DBHDR
7. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	Rp. 320.799.762	APBD (DAU)
9. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Rp. 138.948.706	APBD (DAU)
10. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 29.769.280.592	APBD (DAU)

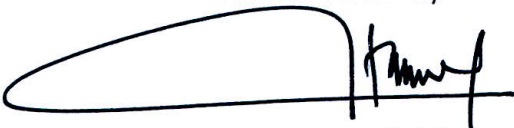
Gorontalo, 20 Januari 2023

Pj. GUBERNUR GORONTALO,



**Dr. Ir. HAMKA HENDRA NOER, M.Si**

KEPALA DINAS,



**FAYZAL LAMAKARAKA, S.STP**